



Original Article

Analisis Framing Media BBC NEWS dan Detik NEWS terhadap Pemberitaan Cina Mengubah Ratusan Nama Desa di Xinjiang untuk Menghapus Budaya Muslim Uighur

Rana Dwi Putri Alham✉

Universitas Hasanuddin
alham.rana@gmail.com✉

Abstract:

This article explores how BBC News and Detik News frame reports on the Chinese government's renaming of hundreds of villages in Xinjiang, viewed as an attempt to erase Uyghur Muslim culture, and examines China's stance toward the Uyghur ethnic group. The study aims to reveal how media construct reality through a framing approach. This qualitative research uses a literature review method, collecting data from books, academic journals, and online sources. The framing analysis applies Robert N. Entman's model, which includes four components: problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. Findings show that both media refer to Human Rights Watch reports and highlight human rights violations. BBC News presents a more balanced perspective, while Detik News emphasizes violence and advocacy. The Chinese government's stance is driven by political and national security interests, leading to counter-terrorism policies.

Keywords: Framing; Online Media; Human Rights; Uyghur



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Hingga saat ini, krisis kemanusiaan masih menjadi salah satu isu sosial yang tidak ada habisnya dan tidak memiliki penyelesaian yang jelas. Krisis kemanusiaan ini tidak lepas dari yang namanya pelanggaran hak asasi manusia, kasus kekerasan, hingga diskriminasi budaya dan agama. Muslim Uighur salah satu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Muslim Uighur merupakan kaum minoritas yang berada di daerah Xinjiang, Tiongkok. Muslim Uighur dipaksa untuk mempelajari ideologi komunis pemerintah Cina dan dipaksa untuk meninggalkan agama Islam. Pemerintah Cina juga mendoktrin Muslim Uighur, mereka melakukan pengurungan, penyiksaan, hingga melakukan perkawinan paksa antara suku Uighur dan suku Cina.

Hampir seluruh populasi Muslim Uighur yang merupakan keturunan etnis Proto Turki aliran Sunni, sehingga mereka memiliki banyak kesamaan dalam budaya dan bahasa. Uighur menetap di wilayah Xinjiang, Cina yang merupakan wilayah otonomi yang berada di sebelah barat negara Cina dan berbatasan langsung dengan Kazakhtan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, serta Afghanistan. Pemerintah Cina menerapkan kebijakan yang sangat membatasi praktik keagamaan dan ibadah bagi Muslim Uighur, mereka menciptakan lingkungan represif serta penuh pengawasan. Di tahun 2015, peraturan pelarangan menggunakan nama-nama tertentu yang dianggap ekstremis oleh umat Islam diberlakukan, hal tersebut termasuk peraturan tahun 2015 yang melarang penggunaan nama-nama tertentu oleh umat Islam. Kemudian, di akhir 2016 pejabat Tiongkok telah menahan 13 juta

orang Uighur dan kelompok etnis Turki lainnya. Di Xinjiang, terjadi penahanan yang meluas, indoktrinasi politik dengan cara memaksa, penghalangan pergerakan, serta penganiayaan agama. Di bawah penindasan yang terjadi tersebut, sampai satu juta penduduk ditahan di Kamp-Kamp pendidikan politik (Kurnia & Baihaqi, 2024).

Banyak media yang memuat terkait konflik Uighur, saat ini tidak diragukan lagi bahwa media massa memiliki peran dalam mempengaruhi opini publik. Melalui proses komunikasi dalam media massa, perilaku serta sikap masyarakat dapat dikendalikan di dalam memandang isu dan dampak dari sebuah peristiwa. Hal tersebut disebabkan berita-berita ini dapat diakses dengan mudah pada media secara online. Media massa memiliki fungsi dalam proses framing (pembingkai), menyeleksi isu, menonjolkan realitas, dan mengemas fakta hingga memilih sudut pandang terhadap teks yang disajikan. Dengan adanya teknik framing ini akan berpengaruh pada suatu konflik sehingga dapat menjadi lebih panas ataupun menjadi peredamnya (Dwita et al., 2023). Analisis framing digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa atau kejadian yang dibingkai dan dipahami oleh media. Sehingga dapat dikatakan analisis framing ialah model yang digunakan untuk mengamati cara bercerita suatu media terhadap peristiwa atau kejadian. Cara bercerita tersebut digambarkan dalam cara melihat terhadap suatu realitas (Deinisya et al., 2023).

Analisis framing termasuk dalam pandangan konstruksionis, yang mana setiap berita yang sampai ke pembaca telah dikonstruksi oleh media massa dan pandangan konstruksionis ini menilai bahwa berita yang sampai ke pembaca ialah berita yang subjektif dan bukan lagi objektif sebagaimana pandangan para kaum positivisme. Framing merupakan salah satu cara untuk menyajikan suatu peristiwa dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, serta membesarkan cerita maupun informasi tertentu dari suatu peristiwa atau realitas sehingga mudah untuk diingat oleh khalayak. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis framing Robert N. Entman yang mana menawarkan kerangka teoritis secara komprehensif guna menganalisis bagaimana media memilih, menyoroti, dan menyajikan informasi. Entman mengidentifikasi empat komponen utama dalam framing, yakni : pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan penetapan solusi (Khoerunnisa, 2024). Secara garis besar, framing oleh Entman dilihat dalam dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penekanan/penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor tersebut lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak untuk ditampilkan serta penekanan isi beritanya (Hidayat & Prasetyo, 2023).

Adapun portal media online dalam penelitian ini yakni BBC News dan Detik News yang sama-sama memberitakan terkait Pemerintah Cina yang mengubah nama ratusan desa di wilayah Xinjiang untuk menghapus budaya Muslim Uighur. BBC News merupakan media internasional dan bagian dari *British Broadcasting Corporation* (BBC) lembaga penyiaran umum Inggris yang didirikan pada tahun 1922 dan sejak saat itu menjadi salah satu media berita yang terpercaya. Selama bertahun-tahun, BBC telah meliput berbagai peristiwa bersejarah seperti perang dunia II, pendaratan di bulan, runtuhnya tembok Berlin, dan serangan teroris 11 september 2001. BBC News telah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan preferensi pemirsa, berkembang dari radio ke televisi, online, dan platform media sosial. Sampai saat ini, BBC terus memberikan liputan berita yang komprehensif, tidak memihak, dan akurat kepada khalayak global (Baxter, 2023). Sementara Detik.com merupakan media digital terpopuler dan terbesar di Indonesia dengan konsep *breaking news* yang menyajikan informasi peristiwa terkini dan *life style*. Detik.com mulai aktif sejak tanggal 29 mei 1998, tetapi mulai online dengan konten berita pada tanggal 9 juli 1998. Detik.com didirikan oleh Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugraha dengan visinya menjadi tujuan utama masyarakat Indonesia untuk konten dan layanan digital. Detik News yang menjadi salah satu kanal di Detik.com menyuguhkan berita setiap hari terkait peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, politik, dan liputan khusus di Indonesia maupun internasional (Company Profile, 2021).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan analisis framing khususnya pada pemberitaan Muslim Uighur ada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Arie Qurrota A'yun dkk dengan judul Framing Media Tiongkok terhadap *East Turkestan Islamic Movement*, pada penelitian ini ETIM (*East Turkestan Islamic Movement*) merupakan kelompok

perlawanan etnis Uighur yang berada di wilayah Xinjiang, mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah Tiongkok. ETIM diframing oleh media CCTV (*China Central Television*) dan CGTN (*China Global Television Network*) sebagai teroris. Pemberitaan yang dilakukan oleh CCTV dan CGTN yang merupakan media yang berada di bawah pengawasan pemerintah Tiongkok membingkai perlawanan yang dilakukan oleh ETIM sebagai tindak teroris yang terjadi di Tiongkok. Penelitian tersebut juga menggunakan analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki yang berfokus pada pengecekan wacana media yang berfokus pada proses seorang jurnalis melakukan penekanan proses informasi yang dimilikinya ([A'yun et al., 2024](#)). Penelitian tersebut meneliti bagaimana media Tiongkok memberitakan terkait ETIM, kemudian bagaimana media Tiongkok membingkai berita tersebut kepada publik. Hasil dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya media Tiongkok berpihak pada pemerintahnya dengan ETIM yang diframing sebagai teroris yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Tiongkok, yang mana bahwa ETIM di sini digambarkan oleh kedua media menjadi pengaruh yang buruk bagi pemerintah Tiongkok. Penelitian tersebut juga berfokus besar pada permasalahan utamanya yakni analisis framing media CCTV dan CGTN. Untuk penelitian penulis menggunakan 2 media berita yang berbeda yakni media internasional dan lokal dan nantinya akan dibandingkan framing dari 2 media berita ini. Selain itu, penelitian penulis juga akan melihat bagaimana sikap pemerintah Cina terhadap etnis Uighur.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana media internasional BBC News dan media lokal Detik News membingkai pemberitaan Cina yang mengubah nama ratusan Desa di wilayah Xinjiang untuk menghapus budaya Muslim Uighur dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, selain itu juga melihat bagaimana sikap pemerintah Cina terhadap etnis Uighur. Analisis framing oleh Robert N Entman Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pembingkai media online dalam menjabarkan dan mengemas suatu berita.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (*library research*). Penulis lebih banyak mengumpulkan data dari buku, jurnal penelitian, *paper*, serta penelusuran data secara online untuk menjawab rumusan masalah dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman. Analisis framing Entman digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dibahas, mendiagnosa akar permasalahan, mengevaluasi masalah, serta memberikan saran perbaikan yang mungkin diperlukan ([Widyaya & Setiawan, 2023](#)).

Pembahasan

Analisis Framing Robert N. Entman

Dalam studi komunikasi, analisis framing ialah pendekatan multidisiplin yang mengeksplorasi fenomena komunikasi dari perspektif yang luas. Analisis framing dapat dianggap sebagai analisis wacana versi terkini, terutama dalam konteks analisis teks media. Analisis framing dapat kita pahami sebagai proses pembingkai berita oleh media massa, termasuk menonjolkan maupun menghilangkan aspek-aspek tertentu untuk menyajikan narasi secara lebih spesifik atau relevan sesuai dengan tujuan komunikasi yang diinginkan ([Widyaya & Setiawan, 2023](#)).

Ada dua jenis framing yang disepakati oleh para sarjana komunikasi dan pakar politik yakni : 1). *Media Frame* (Framing Media), framing media berkaitan dengan bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan para wartawan ketika menyeleksi dan menulis sebuah berita. Perspektif maupun cara pandang ini menentukan fakta apa yang diambil, apa yang ditonjolkan, apa yang hendak dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut; 2) *Individual Frames* (Framing Individu), framing individu merupakan kegiatan penyimpanan ide yang membimbing proses informasi secara individu. Framing individu akan menjadi dasar bagi khalayak guna melakukan interpretasi secara selektif dari

pesan yang disampaikan berita. Dari framing individu ini khalayak dapat menangkap wacana apa yang disampaikan oleh wartawan ([Hidayat & Prasetyo, 2023](#)).

Selain jenis framing, terdapat pula dua aspek dalam framing pemberitaan yakni: 1). memilih fakta atau realitas, proses pemilihan realitas didasari pada asumsi bahwa perspektif wartawan senantiasa mendampingi serta mempengaruhi proses pemilihan realitas berita. Perspektif ini sangat menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan dan dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita tersebut, singkatnya bahwa suatu peristiwa itu akan dilihat dari angle atau sisi tertentu. Oleh sebab itu, realitas atau peristiwa yang sama sangat memungkinkan dikonstruksi dan diberitakan secara berbeda oleh masing-masing media; 2) menulis fakta, proses penulisan fakta ini berkaitan dengan bagaimana fakta yang dipilih disajikan kepada publik. Di dalam proses ini, wartawan biasanya berfokus pada upaya menonjolkan aspek tertentu sehingga aspek tersebut mendapat alokasi dan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan aspek lainnya. Penonjolan ini dibuat agar aspek tertentu dari hasil konstruksi berita menjadi lebih diperhatikan, bermakna, serta berkesan bagi publik. Penonjolan dilakukan dengan cara memilih kata, kalimat, foto, preposisi, serta gambar pendukung yang sesuai yang disajikan ke dalam sebuah berita ([Hidayat & Prasetyo, 2023](#)).

Konsep Framing oleh Entman secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *the power of a communication text*. Analisis framing ini dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh terhadap kesadaran manusia yang didesak oleh transfer informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan, ungkapan, *news report*, ataupun novel ([Hidayat & Prasetyo, 2023](#)). Analisis framing Robert N. Entman melihat framing dengan dua dimensi, yakni seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu. Framing didefinisikan oleh Entman dengan menggunakan empat komponen yakni menyeleksi beberapa aspek dari suatu realitas serta membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa guna mendukung definisi masalah tertentu, memperkirakan sumber masalah, pengambilan keputusan moral, dan rekomendasi pemecahan masalah terhadap masalah yang sedang digambarkan ([Firdausya & Urfan, 2024](#)).

Pada dasarnya, konsepsi framing oleh Entman merujuk pada empat komponen yang telah disebutkan sebelumnya, yakni pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana guna menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Ada empat komponen dalam membingkai suatu berita menurut Entman, yakni :

1. *Define Problems* (Definisi Masalah)

Pendefinisian masalah atau identifikasi masalah ini merupakan komponen pertama yang menunjukkan terkait framing karena komponen ini merupakan *master frame* atau bingkai yang paling utama. Komponen ini menekankan bagaimana peristiwa atau isu dipahami, peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda juga.

2. *Diagnosa Cause* (Penyebab atau Sumber Masalah)

Komponen ini memperkirakan siapa yang dianggap sebagai penyebab atau sumber masalah. Lebih lanjut, ini berkaitan dengan apa dan siapa, karena dalam komponen ini publik dapat melihat siapa dan apa penyebab dari masalah tersebut sebagai bagian yang penting. Bagaimana peristiwa tersebut dapat dipahami, akan menentukan apa dan siapa sebagai sumber masalahnya. Jika siapa ini dipahami secara berbeda, maka dapat menyebabkan apa juga dipahami secara berbeda pula.

3. *Make Moral Judgment* (Membuat Keputusan Moral)

Komponen ini digunakan untuk membenarkan maupun memberikan penilaian terhadap peristiwa yang telah terjadi. Ketika masalah telah diidentifikasi dan penyebabnya sudah diketahui, maka diperlukan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan yang telah diketahui. Dalam memberi pilihan moral ini perlu menggunakan simbol atau bahasa yang telah disepakati secara umum oleh publik.

4. *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Komponen ini menekankan penyelesaian masalah serta menawarkan atau menjustifikasi suatu cara mengatasi masalah dan memprediksikan hasilnya. Bagian ini digunakan untuk menilai apa yang dilakukan oleh wartawan. Pilihan mana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian ini tergantung dari bagaimana itu dilihat dan apa yang dipandang sebagai penyebab dari masalah tersebut ([Hidayat & Prasetyo, 2023](#)).

Latar Belakang Konflik Uighur

Dahulu, wilayah Xinjiang bernama Turkistan Timur yang merupakan wilayah yang berdiri sendiri, tidak masuk di dalam kedaulatan Cina dengan populasi penduduknya berasal dari wilayah Asia Tengah. Adapun komoditas sumber daya alamnya yang melimpah yakni di antaranya sumber daya gas alam dan sumber daya minyak mentah. Komoditas sumber daya alam yang melimpah ini dapat menjadi nilai jual utama dari wilayah Turkistan Timur. Selain itu pula, wilayah Turkistan Timur berbatasan langsung dengan sejumlah negara dari Asia Tengah, sebab itu wilayah Turkistan Timur ini dianggap sangat strategis dalam aspek perdagangan. Di abad ke-8, Turkistan Timur berada di bawah kekaisaran kekhanan Uighur. Pada saat itu etnis Uighur memiliki pemerintahan yang independen atau sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri di luar dari pemerintahan Cina. Tetapi, di tahun 1750 Cina mulai masuk ke wilayah Turkistan Timur dan mempengaruhi politik yang ada di wilayah tersebut. Pada tahun 1884, Cina berhasil membuat wilayah Turkistan Timur berada di bawah pemerintahan Cina, tetapi pengaruh dari Uni Soviet masih kuat. Namun, karena ada konflik internal yakni perang saudara di Cina, etnis Uighur dapat kembali mengambil alih kekuasaan Turkistan Timur sebanyak dua kali yakni pada tahun 1933-1934 dan di tahun 1944-1949, saat itu etnis Uighur mendeklarasikan Turkistan Timur sebagai negara republik Turkistan Timur ([Putri & Yumitro, 2022](#)).

Pada tahun 1949, saat menangnya Mao Tse Tung serta datangnya pasukan pembebasan rakyat ke Turkistan Timur, membuat wilayah Turkistan Timur kembali jatuh ke tangan pemerintah Cina. Republik Turkistan Timur kemudian dibubarkan dan namanya diganti menjadi Xinjiang yang berarti batas baru. Pemerintah Cina kemudian menjadikan Xinjiang wilayah otonomi Cina serta membentuk XUAR (*Xinjiang Uighur Autonomous Region*) di tahun 1955. Sistem pemerintahan Xinjiang pun mengikuti sistem pemerintah Cina yakni sistem pemerintahan komunis. Di saat Xinjiang telah menjadi wilayah otonomi Cina, berbagai tindakan diskriminasi terhadap etnis Uighur terjadi, tindakan kekerasan secara fisik maupun secara psikis dilakukan oleh pemerintah Cina ([Putri & Yumitro, 2022](#)). Di masa pemerintahan Deng Xiaoping terdapat kebijakan asimilasi budaya, yang mana etnis Han atau ras murni China diletakkan di wilayah Xinjiang untuk mengintegrasikan budaya etnis Han terhadap budaya Uighur sekaligus untuk membangun perekonomian di Xinjiang. Hal ini tentu saja dilawan oleh etnis Uighur, yang mana mereka memandang hal tersebut sebagai cara melemahkan budaya etnis Uighur serta memastikan budaya dan etnis Han mendominasi wilayah Xinjiang. Kebebasan beribadah kemudian dikekang oleh pemerintah Cina sebab awalnya dianggap tidak sesuai dengan kaidah nilai pemerintahan *Chinese Communist Party* (CCP). Terhambatnya aktivitas beribadah ini membuat munculnya beberapa kelompok ekstremis untuk melawan kebijakan dari Cina, salah satunya ialah ETIM (*East Turkestan Islamic Movement*) ([F. S & Setowara, 2023](#)).

Secara kultural, etnis Uighur harus bertahan dalam arus globalisasi yang begitu cepat akibat adanya perbedaan etnis. Pemerintah Cina fokus untuk mencapai keseimbangan populasi di antara etnis Uighur dan etnis Han. Adanya program keseimbangan demografis serta sulitnya menerima heterogenitas budaya, pemerintah Cina melakukan banyak tindakan diskriminatif ([Oktavia, 2023](#)). Peristiwa Baren di tahun 1990 adalah awal munculnya kerusuhan di Xinjiang yang dimotivasi oleh religius ekstremis, yakni ratusan etnis Uighur bersenjata menyerang Baren, hingga pasukan militer diturunkan untuk menghentikan serangan tersebut. ETIM diduga menjadi dalang dari pemberontakan peristiwa Baren dan beberapa pemberontakan lainnya setelah peristiwa Baren. Pada 5 april, para ekstremis tersebut berhasil mengerahkan 200 orang serta menyerukan jihad melalui

loudspeaker di beberapa masjid di Baren dan Turand yang bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Cina dari penindasan yang mereka alami. Pemerintah Cina menganggap pemberontakan tersebut sebagai sebuah *counter-revolution*. Peristiwa tersebut berakhir dengan turunnya pasukan militer dan menetralkan kejadian. Kemudian aksi pemberontakan tersebut diikuti oleh berbagai aksi teror lainnya, yang mana di tahun 1992 terjadi pengeboman bus di Urumqi. Pemerintah Cina turun tangan dengan melakukan penangkapan serta eksekusi orang-orang yang berkaitan langsung dengan pengeboman, gerakan separatis ekstremis dan orang-orang yang diduga. Semenjak peristiwa tersebut Cina memandang Islam sebagai agama yang militan ([F. S & Setowara, 2023](#)).

Pada tahun 1997, pemerintah Cina melakukan pembantaian Gulja. Pembantaian tersebut berawal dari sebuah adat budaya yang dimiliki serta dipraktikkan oleh Etnis Uighur yakni *Meshrep*, yakni sebuah tradisi para laki-laki Uighur melakukan pertemuan non formal seraya melantunkan musik, tarian, puisi, dan perbincangan religius. Di awal tahun 1990, pemerintah Cina memandang hal tersebut sebagai sebuah ancaman. Diketahui bahwa di tahun 1990-an adalah titik awal munculnya gerakan-gerakan pemberontak yang dilakukan etnis Uighur yang dimotivasi oleh permintaan kebebasan beragama dan budaya. Sementara tanggapan oleh pemerintah Cina tidak hanya berlebihan dalam meredam, melainkan juga tidak memberi solusi yang kuat serta membuat etnis Uighur seperti kelompok inferior yang mengancam kedaulatan Cina. Agama Islam yang melekat pada etnis Uighur menjadi salah satu alasan utama pemerintahan Cina menganggap Uighur sebagai ancaman, sebab berlawanan dengan ideologi komunisme yang dimiliki oleh pemerintah Cina, juga menjadi asal mula gerakan ekstremis separatis. Pemerintah Cina kemudian mengeluarkan kebijakan *Internment Camp* yang memiliki tujuan menekan ekstremisme di wilayah Xinjiang, homogenisasi budaya, memasukkan ideologi komunisme, bahasa tiongkok, serta edukasi bahayanya ekstremisme agar tindakan-tindakan ekstremisme maupun pemberontakan bisa dihindari ([F. S & Setowara, 2023](#)).

Pemerintah Cina menerapkan kebijakan yang sangat membatasi praktik keagamaan dan ibadah Muslim Uighur, serta menciptakan lingkungan yang represif dan penuh dengan pengawasan. Salah satu contoh konkretnya ialah di tahun 2015, adanya peraturan yang melarang penggunaan nama-nama tertentu yang dianggap ekstremis oleh umat Islam. Termasuk juga peraturan yang melarang penggunaan nama-nama tertentu oleh umat Islam. Kemudian, sejak akhir 2016 pejabat Cina menahan 13 juta orang Uighur dan kelompok etnis Turki lainnya. Di wilayah Xinjiang, telah terjadi penahanan yang meluas, indoktrinasi politik secara paksa, penghalangan pergerakan, dan penganiayaan agama. Di bawah penindasan yang terjadi tersebut, satu juta penduduk ditahan di Kamp-Kamp pendidikan politik. Pemerintah Cina juga melakukan pengasingan massal melalui Kamp-Kamp penahanan yang disebut pusat pendidikan ulang, yang mana etnis Uighur dipaksa untuk menjalani indoktrinasi politik, belajar bahasa mandarin, serta melepaskan identitas keagamaan dan budaya mereka. Satu juta orang Uighur yang ditahan di Kamp-Kamp pendidikan politik mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Melalui “Kampanye Keras Melawan Terorisme Kekerasan” pemerintah Cina menjadikan wilayah Xinjiang sebagai pusat utama untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat kontrol sosial yang ketat. Kebijakan tersebut meliputi pengumpulan data biometrik, yakni pemindaian wajah, sidik jari, dan sampel DNA, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan individu dan secara terang-terangan melanggar privasi. Teknologi pengawasan yang canggih tersebut digunakan guna memantau pergerakan serta aktivitas sehari-hari etnis Uighur, memperketat kontrol atas setiap aspek kehidupan Muslim Uighur ([Kurnia & Baihaqi, 2024](#)).

Pada tahun 2022, kantor hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa ada kemungkinan terjadi kejahatan kemanusiaan di Xinjiang, berdasarkan pada penahanan secara diskriminatif yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur. Beijing kemudian menepis tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai disinformasi dan kebohongan yang dibuat oleh kekuatan anti-Cina. Kunjungan presiden Cina, Xi Jinping ke Xinjiang kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan organisasi HAM dan para aktivis. Mereka menduga bahwa Beijing sedang berniat untuk melakukan penegasan ulang arah kebijakan di Xinjiang, tetapi dengan narasi yang lebih positif. Sejak Xi Jinping berkuasa

di tahun 2013, Xinjiang sudah berada dalam pengawasan ketat dan ditopang oleh teknologi tinggi. Dilaporkan bahwa lebih dari satu juta warga Uighur ditahan di Kamp-Kamp pendidikan. Pemerintah Cina mengklaim bahwa pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan dibangun untuk memerangi ekstremisme dan terorisme. Tetapi Beijing dikritik karena diyakini juga ingin ikut menghapus identitas dan kebudayaan Uighur di Xinjiang ([Li, 2023](#)).

Secara keseluruhan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Cina di wilayah Xinjiang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara universal, melainkan juga bertentangan dengan berbagai konvensi serta hukum internasional yang dirancang untuk melindungi martabat dan hak individu. Penindasan yang meluas dan secara sistematis ini menggarisbawahi bahwa perlunya tekanan internasional yang lebih besar untuk dapat menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Dampak nyata dari adanya kebijakan represif pemerintah Cina terhadap etnis Uighur sangat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan baik itu secara fisik, psikologis, maupun sosial dan budaya. Secara fisik, banyak muslim Uighur yang ditahan secara massal di Kamp-Kamp pendidikan politik, yang mana seringkali mereka mengalami penyiksaan, kekerasan fisik, serta kondisi yang tidak manusiawi. Muslim Uighur yang ditahan menjalani kerja paksa, diberi makanan yang tidak mencukupi, dipaksa tinggal dalam kondisi yang tidak layak, dan ini semua berdampak buruk pada kesehatan fisik mereka. Secara psikologis, kebijakan pengawasan yang secara ketat dan pembatasan kebebasan beragama menimbulkan trauma yang mendalam di kalangan Muslim Uighur. Ketakutan untuk ditangkap dan dikirim ke Kamp-Kamp menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Banyak Muslim Uighur yang hidup di dalam ketidakpastian dan ketakutan secara terus-menerus, dan hal ini mempengaruhi kesehatan mental mereka ([Kurnia & Baihaqi, 2024](#)).

Dari sisi sosial-budaya, kebijakan-kebijakan pemerintah Cina ini berdampak serius terhadap identitas budaya dan agama Muslim Uighur. Upaya sistematis mereka untuk menghapus penggunaan bahasa Uighur, simbol-simbol keagamaan, serta tradisi budaya yang menyebabkan hilangnya identitas budaya yang menjadi bagian integral dalam kehidupan budaya Muslim Uighur selama ini. Disintegrasi masyarakat pun terjadi disebabkan keluarga dipisahkan dengan banyak anggota keluarga ditahan atau dipaksa untuk meninggalkan rumahnya sendiri. Diskriminasi dan marginalisasi yang berkelanjutan juga memperburuk kondisi sosial Uighur, membuat etnis Uighur semakin terpinggirkan di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, tindakan pemerintah Cina ini tidak hanya merusak struktur sosial etnis Uighur, melainkan juga mengancam keberlangsungan warisan budaya mereka di masa depan dalam menggambarkan betapa beratnya penderitaan yang dialami etnis Uighur di wilayah Xinjiang akibat kebijakan represif pemerintah Cina. Dampak yang dirasakan oleh Muslim Uighur tidak hanya terasa dalam jangka pendek, melainkan juga membawa implikasi yang panjang bagi kesehatan fisik, mental, serta kelangsungan budaya Uighur ([Kurnia & Baihaqi, 2024](#)). Konflik yang terjadi di Xinjiang terutama yang dialami oleh etnis Uighur ini berakar dari pemerintah Cina yang ingin menguasai secara utuh wilayah Xinjiang dan menjadikan wilayah tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Cina, tetapi dalam perjalanannya pemerintah Cina telah melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur, yang mana pelanggaran ini pun mereka bantah dengan alasan mendidik etnis Uighur di Kamp-Kamp yang mereka buat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa isu ini sangat membutuhkan tekanan dan dukungan internasional yang lebih besar dan tindakan secara nyata untuk menangani tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Uighur.

Sikap Pemerintah Cina terhadap Etnis Uighur

Muslim di Cina merupakan salah satu minoritas muslim yang masih ada hingga saat ini. Islam pertama kali masuk ke Cina pada tahun 651 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Tang. Pada saat itu, Khalifah Utsman bin Affan (644-656) mengirim utusan diplomatik ke Cina. Di sana utusan tersebut kemudian memperkenalkan budaya dan adat istiadatnya, termasuk memperkenalkan Islam. Sehingga agama Islam telah tumbuh dan berkembang hingga saat ini di Cina. Setidaknya ada sepuluh etnis Muslim di Cina, yaitu Uighur, Hui, Kazakh, Tatar, Uzbek, Kirgistan, Dongxiang, Tajik, Salar, dan Bonan (Bao'an). Di antara

sepuluh kelompok etnis Muslim tersebut, populasi terbesar ialah Uighur dan Hui ([Wang, 2022](#)). Uighur merupakan etnis minoritas di wilayah Xinjiang, yang terletak di ujung barat laut Cina. Mayoritas etnis Uighur ini beragama Islam. Secara budaya, Uighur lebih banyak dipengaruhi oleh peradaban di perbatasan Cina Barat, seperti Kazakhstan, Tajikistan, Kirghiziastan, Pakistan, dan daerah-daerah yang didominasi oleh budaya Islam. Adanya perbedaan budaya antara etnis Uighur dan Han membuat etnis Uighur sulit untuk beradaptasi dengan etnis Han. Kekhawatiran etnis Uighur akan hilangnya identitas budaya akibat kebijakan asimilasi besar-besaran yang dilakukan oleh Cina menyebabkan gerakan-gerakan pembebasan Turkestan Timur mengeraskan sikap penolakan mereka untuk bergabung dengan Cina ([Nurhidayati et al., 2022](#)).

Setelah pemerintah komunis Cina menguasai wilayah Turkistan pada tahun 1949, jumlah pengikut komunisme Han Tionghoa di daerah tersebut meningkat dari 6,7% menjadi 40,6%. Hal ini kemudian membuat semua fungsi dan kegiatan politik di wilayah Xinjiang dikendalikan oleh etnis Han. Dengan dukungan pemerintah Cina, mereka juga memberlakukan kondisi yang mengisolasi dan membatasi pelaksanaan ritual keagamaan dan melarang Muslim Uighur menggunakan bahasa mereka di sekolah. Otoritas Cina juga melakukan diskriminasi rasial dengan hanya menerima orang-orang dari etnis Han dalam birokrasi pemerintahan. Diskriminasi ini kemudian berkembang dan berdampak pada keberlangsungan hidup etnis Uighur, sehingga sebagai kaum minoritas Uighur menuntut keadilan dan hak-hak hidupnya diakui termasuk hak-hak dasar mereka terkait kebebasan beragama. Namun, pemerintah Cina menolak dan mengambil tindakan represif dengan menggunakan pendekatan militer. Akibat adanya diskriminasi yang dialami oleh etnis Uighur di Xinjiang, etnis Uighur melakukan berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk respon atas perlakuan dan penindasan dari pemerintah yang dirasa sangat tidak adil dan merugikan etnis Uighur. Seiring dengan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang yang didasari oleh beberapa faktor, yaitu ekonomi dan keamanan Cina. Bagi pemerintah Cina, membiarkan warga Uighur melarikan diri akan berdampak pada menguatnya gerakan nasionalis lain yang menentang pemerintah Cina, seperti Tibet, Mongolia, dan Taiwan. Karena kekhawatiran tersebut, Cina mengambil langkah-langkah represif untuk meredam keinginan pemisahan diri Uighur serta perkembangan sentimen Uighur di Xinjiang ([Nurhidayati et al., 2022](#)).

Melindungi integritas wilayah dan persatuan nasional merupakan perhatian utama pemerintah Cina. Ketidakpuasan etnis Uighur atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan berpihak pada etnis Han memicu kerusuhan di Xinjiang hingga mereka membentuk kelompok yang menginginkan Xinjiang merdeka dari Cina. Pemerintah Cina menganggap kelompok pejuang Xinjiang sebagai teroris. Teroris, separatistis, dan esktrimis agama digabung menjadi satu oleh pemerintah Cina, yang mana pemerintah Cina kemudian mengambil tindakan untuk mempersekusi etnis Uighur hingga sekarang demi kepentingan Cina. Selain faktor-faktor tersebut, fakta lainnya adalah bahwa Xinjiang memiliki faktor geografis yang menjadi alasan mengapa pemerintah Cina mempertahankan wilayah Xinjiang. Cina, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak tinggal diam ketika mengetahui adanya sumber daya alam yaitu minyak di wilayah Xinjiang ([Nurhidayati et al., 2022](#)). Awal mulanya, hubungan antara Cina dan Muslim Uighur memiliki hubungan yang dapat dibilang baik, tetapi terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh An Lu Shan dan di sini terjadi konflik yang cukup panas. Sekitar tahun 1990-2016 masih banyak terjadi keributan di antara Muslim Uighur dan Cina. Keributan yang terjadi pun sampai menggunakan senjata hingga melakukan demonstrasi serta tindakan yang mengancam perpecahan wilayah. Bahkan Cina melakukan penahanan terhadap 1 juta orang di dalam sebuah Kamp pengasingan di wilayah Xinjiang. Cina tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan, tetapi mereka menganggap bahwa hal tersebut ialah upaya dalam mempertahankan sebuah kepentingan nasional dalam mempertahankan wilayah Xinjiang ([Hanif & Maula, 2022](#)).

Di awal tahun 2000, tindakan terorisme semakin marak begitu pun dengan Cina yang menjadi salah satu negara yang tidak terhindarkan dari aksi teror. Teror yang terjadi di Cina dilakukan oleh kelompok separatistis yang disebut gerakan Islam Turkestan Timur.

Pemerintah Cina mengumumkan pada Mei 2014 diberlakukan penumpasan keras terhadap aktivitas kekerasan teroris, tepatnya setelah kejadian bom yang terjadi di Urumqi yang menewaskan 31 orang. Di awal Oktober, pihak berwenang memberlakukan larangan perjalanan di wilayah otonomi Uighur Xinjiang, mencegah penduduk setempat untuk meninggalkan wilayah tersebut kecuali benar-benar diperlukan. Kampanye *Strike Hard Against Extremist Terrorism* mulai diberlakukan ketika itu dan situasi di Cina pun memanas. Keberlanjutan dari kampanye tersebut ialah dengan mengurung orang-orang Uighur di Kamp re-edukasi. Di dalam Kamp tersebut diterapkan sebuah sistem khusus yang dibuat oleh pemerintah Cina dengan anggapan sebagai cara untuk menertibkan situasi serta menjaga stabilitas di tengah konflik yang sedang terjadi. Kampanye tersebut juga meliputi mobilisasi penduduk, termasuk etnis Uighur, untuk membantu pihak berwenang menangkap teroris dan menyampaikan informasi terkait tersangka dan terduga teroris. Selama tahun 2014, media non-pemerintah melaporkan adanya peningkatan pengawasan terhadap minoritas Muslim di seluruh negeri, dan penahanan sewenang-wenang serta pemulangan paksa orang-orang Uighur yang tinggal di luar Xinjiang ([Zahrah & Windiani, 2023](#)).

Pada bulan Mei 2014, Kamp re-edukasi didirikan secara khusus untuk menahan orang-orang Uighur di Xinjiang yang dianggap sebagai pelaku utama dari aksi teror yang terjadi, tetapi program tersebut beroperasi secara rahasia serta berada di luar sistem hukum. Kamp re-edukasi tersebut menerapkan sistem khusus yang dibuat oleh pemerintah Cina sebagai cara untuk menertibkan situasi serta menjaga stabilitas di tengah gejolak konflik yang terjadi. Program tersebut mulai muncul di hadapan publik pada tahun 2017, bahkan media lokal menyebut fasilitas tersebut sebagai pusat pelatihan kontra-ekstremisme serta pusat pelatihan pendidikan dan transformasi ([Zahrah & Windiani, 2023](#)). Laporan media Cina terkait insiden teroris juga semakin meningkat secara signifikan dan sebagian besar insiden teroris tersebut terjadi di wilayah Xinjiang, kota-kota besar di Beijing, Kunming, dan Guangzhou. Sehubungan dengan hal itu, Cina mulai meningkatkan keamanan untuk mencegah terjadinya serangan-serangan selanjutnya ([Alpermann & Malzer, 2024](#)). Upaya kontra terorisme Cina kemudian difokuskan pada wilayah Xinjiang yang rentan pada serangan teroris dan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang berpotensi tinggi terhadap terorisme. Implementasi dari kebijakan kontra terorisme yakni didirikannya Kamp Interniran, Kamp tersebut merupakan Kamp pendidikan ulang (*re-education*) seperti yang telah dibahas sebelumnya. Kamp ini diisi oleh orang-orang yang dinilai telah terpengaruh paham radikal. Kebijakan ini pun ditujukan kepada penduduk Xinjiang yang berperilaku kriminal serta berpotensi menjadi teroris dan berperilaku ekstremis yang membahayakan penduduk Xinjiang lainnya ([Tahu, 2023](#)).

Pendirian Kamp Interniran tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Ini disebabkan banyak media barat yang mengiring opini publik internasional bahwa Kamp Interniran ialah penjara besar yang didirikan pemerintah Cina untuk mengurung dan mendiskriminasi salah satu etnis, yakni etnis Uighur di wilayah Xinjiang. Media barat mengklaim bahwa Kamp tersebut didirikan untuk membatasi pergerakan dan kebebasan etnis Uighur. Kamp Interniran ini juga diklaim sebagai tempat untuk mengajari etnis Uighur yang mayoritasnya beragama Islam untuk mempelajari paham komunis, sehingga tindakan dari pemerintah Cina ini terbukti melanggar kebebasan beragama ([BBC, 2022](#)). Akibat propaganda dari media barat, Cina mendapat banyak kecaman internasional dan desakan dari PBB terkait kebijakan kontra terorisme mereka yang mendirikan Kamp Interniran. Menurut PBB, kebijakan tersebut akan berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur. Hal ini membuat pemerintah Cina secara aktif memberikan respon terhadap berita propaganda dari media barat. Media Cina mengklaim bahwa terdapat disinformasi mengenai kebijakan kontra terorisme dan pendirian Kamp Interniran. Media Cina menyatakan bahwa Kamp Interniran tidak hanya diperuntukkan bagi etnis Uighur saja, tetapi juga ada beberapa etnis seperti Kazakh, Kyrgyz, dan etnis Muslim Turki lainnya. Selain itu, ada juga yang beragama Kristen, dan beberapa warga negara asing termasuk warga Kazakhstan, walaupun jumlah yang ada di Kamp Interniran tersebut lebih banyak didominasi oleh etnis Uighur ([Tahu, 2023](#)).

Pemerintah Cina secara aktif memberikan respon maupun tanggapannya di berbagai forum internasional serta melakukan berbagai konferensi pers. Namun, hal ini tidak membuat media-media barat berhenti untuk memberitakan dan mempropagandakan ke publik terkait isu diskriminasi etnis Uighur melalui kebijakan Cina tentang Kamp Interniran sebagai upaya kontra terorisme dan ekstremisme. Cina tentunya tidak tinggal diam terhadap pemberitaan tersebut yang dianggap mencoreng citra negaranya. Cina melakukan strategi propaganda berupa kampanye disinformasi melalui media-media internasionalnya, seperti *Global Times*, *China Global Television Network (CGTN)*, *China Central Television (CCTV)*, dan *China Daily* sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap monopoli media barat (Alpermann & Malzer, 2024). Selain itu, Cina juga membentuk organ utama yakni Departemen Propaganda dan *United Front Work Departemen (UFW)*. Kedua departemen tersebut bertugas untuk melakukan perjuangan opini publik, mengarahkan, mengawasi, dan mengontrol langsung media-media dalam melakukan propaganda guna membalas media ekstrim barat yang secara agresif memberitakan kebohongan pada publik untuk ikut serta mengecam Cina. Strategi propaganda Cina ini makin menegaskan kepada media internasional bahwa Cina bertujuan untuk memperoleh kembali kepercayaan publik dengan memperkuat strategi medianya dengan harapan publik dapat melihat isu tersebut dengan dua sudut pandang yang berbeda sehingga bisa menilai kebenaran secara proporsional (Tahu, 2023).

Kamp di wilayah Xinjiang ini merupakan lokasi terlarang yang mana orang luar tidak diperbolehkan untuk memasukinya, bahkan Kamp ini juga dijaga secara ketat oleh pemerintah Cina bahkan ada menara pengawas dan dikelilingi pagar yang tinggi, tetapi menara pengawas tersebut telah dihilangkan dan direkonstruksi menjadi lapangan olahraga. Di dalam Kamp mereka diberikan materi-materi de-radikalisasi, dan hal pertama yang diajarkan ialah harus mencintai partai komunis, mereka juga diajarkan terkait hukum dan ideologi Cina. Cerita salah satu warga bernama Rakhima Senbay yang kini telah tinggal di wilayah Kazakhstan, ia bercerita mengenai pengalamannya berada di Kamp tersebut. Dia ditahan di Kamp tersebut selama satu tahun sebab ketahuan menggunakan whatsapp. Dalam masa tahanannya ia mengalami perlakuan kasar dan menyakitkan, ia juga menyatakan bahwa tempat-tempat yang didatangi wartawan merupakan tempat-tempat yang telah disiapkan secara khusus sehingga terlihat baik. Ketika ada seorang wartawan yang memasuki Kamp maka penghuni yang ada di dalam harus terlihat ceria, jika tidak maka mereka akan mendapatkan hukuman. Tetapi, wartawan tidak dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap penghuni Kamp dikarenakan penjagaan yang ketat. Pendirian Kamp oleh pemerintah Cina ini ditujukan agar mengurangi pencegahan kriminal, Cina menganggap bahwa ada beberapa orang yang berpotensi untuk membunuh sehingga lebih baik untuk mencegah hal tersebut terjadi. Xu Guixiang selaku Departemen Propaganda Xinjiang menjawab terkait isu kekerasan yang terjadi di Kamp, ia menyatakan bahwa yang lebih utama ialah pemerintah Cina dapat mengamankan orang yang hampir berbuat kriminal dan akan dikembalikan ke masyarakat lagi (Hanif & Maula, 2022).

Seorang wartawan bernama Uni Lubis, menceritakan pengalamannya ketika secara langsung melihat Kamp Uighur di Xinjiang. Uni Lubis telah dua kali pergi ke Xinjiang di tahun 2016 dan 2019 bersama dengan rombongan wartawan Indonesia dan Malaysia. Di tahun 2016, suasana di wilayah Xinjiang sangat rileks ramai dan damai, para rombongan memiliki waktu yang cukup fleksibel dan enjoy. Sedangkan di tahun 2019, wilayah Xinjiang terlihat lebih sepi bahkan rombongan wartawan dijaga sangat ketat oleh pemerintah setempat. Mereka langsung diantarkan ke lobi Kamp Uighur yang mana di Kamp tersebut dilengkapi pagar tingi di atasnya yang terdapat kawat berduri. Di lobi tersebut mereka disambut oleh kepala dan pengurus Kamp. Saat wawancara pun mereka dijaga dengan sangat ketat sampai gurunya mendampingi proses wawancara tersebut, sehingga tidak banyak yang dapat dikulik oleh wartawan melalui wawancara tersebut. Uni Lubis juga menceritakan bahwa ada salah satu ruangan, yang mana ruangan tersebut tidak dapat dibuka dari dalam jadi jika penghuni ruangan tersebut sudah masuk ke dalam maka ia tidak dapat lagi keluar kecuali dibukakan dari luar. Hal ini yang menimbulkan asumsi bahwa Kamp tersebut seperti penjara. Menurut Uni Lubis bahwa kehidupan di Kamp telah

melanggar hak asasi manusia, sebab umat Muslim tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dengan bebas, ibu-ibu yang memiliki anak kecil dipisahkan dengan anaknya untuk mengikuti pembelajaran yang ada di Kamp. Sebelumnya juga banyak Muslim Uighur yang menggunakan jilbab, namun karena ada kegiatan sekolah di Kamp mereka akhirnya tidak menggunakan jilbab ([Hanif & Maula, 2022](#)).

Pemerintah Cina telah menganggap etnis Uighur sebagai sebuah ancaman nasional untuk kedaulatan negaranya. Oleh karena itu, sikap pemerintah Cina terhadap etnis Uighur ialah dengan menerapkan kebijakan kontra terorisme dengan mendirikan Kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang. Sikap pemerintah Cina ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan keamanan nasional. Pemerintah Cina memandang bahwa wilayah Xinjiang sebagai kawasan yang strategis dan harus dijaga dari adanya ancaman separatisme dan ekstremisme. Adanya ketidaksesuaian budaya dan identitas agama di antara etnis Uighur dan etnis Han menjadi latar belakang munculnya kebijakan asimilasi secara besar-besaran di wilayah Xinjiang. Pemerintah Cina merespon dinamika tersebut dengan adanya pengawasan ketat, dibatasinya praktik keagamaan, dan didirikannya Kamp pendidikan ulang yang diklaim sebagai upaya deradikalisasi dan kontra terorisme. Tetapi, kebijakan ini menimbulkan kritik yang luas dari berbagai pihak internasional sebab dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta penindasan terhadap kebebasan beragama. Walau banyaknya bukti yang menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Cina, pihak Cina selalu membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan sebagai bentuk menjaga keamanan negara dan mencegah separatisme.

Analisis Framing Media BBC News dan Detik News

Berikut adalah tabel data berita terhadap pemberitaan Cina mengubah ratusan nama Desa di Xinjiang untuk menghapus budaya Muslim Uighur pada media online BBC News dan Detik News

Tabel 1. Data Berita yang diteliti

No.	Nama Media Online	Waktu Terbit	Judul Berita
1.	BBC News (Lamche, 2024)	Rabu, 19 Juni 2024	China changed village names 'to erase Uyghur culture'
2.	Detik News (Welle, 2024)	Kamis, 20 Juni 2024	HRW: China Ubah Ratusan Nama Desa-Desa Uighur

Tabel 2. Skema analisis berita BBC News; China changed village names 'to erase Uyghur culture'

Judul Berita	Define Problems (Definisi Masalah)	Diagnose Causes (Penyebab atau Sumber Masalah)	Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Treatment Recommendations (Menekankan Penyelesaian)
China changed village names 'to erase Uyghur culture'	Dalam pemberitaan BBC News yang menjadi masalah utama yakni Pemerintah Cina yang	Pemerintah Cina adalah aktor penyebab dalam pemberitaan BBC News, pergantian nama-nama	BBC News menunjukkan bahwa banyak bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi	BBC News tidak secara spesifik menyebutkan solusi atau langkah penyelesaian terkait perubahan nama-nama desa di wilayah Xinjiang. Fokus berita ini ialah

mengubah nama desa di wilayah Xinjiang untuk menghapus budaya Muslim Uighur.	desa di wilayah Xinjiang yang dilakukan oleh pemerintah Cina ini telah dilakukan di antara tahun 2009 dan 2023.	di manusia yang sistematis terhadap populasi Muslim Uighur di Cina. Para pengamat juga mengatakan bahwa mereka telah menyaksikan tindakan kekerasan terhadap agama yang terorganisir.	perubahan nama-nama desa di wilayah Xinjiang, yang bertujuan untuk menghapus budaya Muslim Uighur, namun dalam pernyataan juru bicara kedutaan besar Cina di London membantah tuduhan tersebut bahwa semua orang dari kelompok etnis menikmati kebebasan beragama berdasarkan hukum. Bahasa dan budaya suku Uighur dan kelompok etnis minoritas lainnya dilindungi.
--	---	---	---

Tabel 3. Skema analisis berita Detik News; HRW: China Ubah Ratusan Nama Desa-Desa Uighur

Judul Berita	Define Problems (Definisi Masalah)	Diagnose Causes (Penyebab atau Sumber Masalah)	Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Treatment Recommendations (Menekankan Penyelesaian)
HRW: China Ubah Ratusan Nama Desa-Desa Uighur	Detik News menyoroiti laporan oleh <i>Human Rights Watch</i> (HRW) yang menyatakan bahwa pemerintah Cina telah mengubah nama-nama Desa di wilayah Xinjiang yang dihuni oleh Muslim Uighur.	Perubahan nama-nama Desa di wilayah Xinjiang ini karena merujuk pada istilah-istilah Islam atau budaya dan sejarah Uighur, otoritas Cina merubahnya agar mencerminkan ideologi partai komunis.	Detik News menunjukkan bahwa Pemerintah Cina ini melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas yang mana salah satunya ialah etnis Uighur.	Detik News menyoroiti pernyataan pendiri Uighur Hjelp, Abduweli Ayub yang mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah yang merasa peduli, dan departemen Hak Asasi Manusia (HAM) PBB harus mengintensifkan upayanya dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah Cina terkait pelanggaran yang mereka lakukan di wilayah Uighur.

Berdasarkan framing Entman dari keempat elemennya, media online BBC News memuat isi beritanya berdasar pada laporan milik *Human Rights Watch* (HRW) selain itu, BBC News juga meliput secara langsung pernyataan juru bicara kedutaan besar Cina di London yang

membantah tuduhan terkait perubahan nama-nama Desa di Xinjiang yang bertujuan untuk menghapus budaya Muslim Uighur. BBC News juga menjelaskan istilah-istilah pada etnis Uighur yang diubah oleh otoritas Cina seperti Hoja, sebuah gelar untuk seorang guru Islam Sufi dan gelar politik atau kehormatan yang diganti dengan istilah-istilah yang mencerminkan ideologi partai komunis. BBC banyak menyoroti hasil laporan HRW yang bekerja sama dengan Uyghur Hjelp sebuah organisasi yang berbasis di Norwegia. Selain itu, BBC News juga menyoroti semakin banyak bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis terhadap populasi Muslim Uighur di Cina, meskipun hal tersebut juga dibantah oleh pemerintah Cina.

Untuk media online Detik News juga memuat isi beritanya berdasarkan pada laporan milik HRW yang mengatakan bahwa Cina telah mengubah nama-nama desa di wilayah Xinjiang yang ditinggali oleh etnis Uighur. Perubahan nama-nama yang dilakukan oleh pemerintah Cina agar dapat mencerminkan ideologi partai komunis Cina. Sama dengan BBC News, Detik News juga menjelaskan beberapa istilah dalam etnis Uighur yang diubah oleh pemerintah Cina. Detik News juga menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap kelompok minoritas salah satunya terhadap etnis Uighur. Detik News dalam beritanya menyatakan pemerintah Cina di tahun 2014 meluncurkan kampanye serangan melawan terorisme di wilayah Xinjiang, kemudian di tahun 2017 pemerintah Cina meluncurkan kampanye asimilasi serta melakukan penahanan massal, indoktrinasi politik, kerja paksa, hingga pemisahan keluarga. Detik News juga menjelaskan bahwa di tahun 2022 laporan dari HAM PBB (OHCHR) menyimpulkan adanya penahanan diskriminatif oleh pemerintah Cina terhadap etnis Uighur di wilayah Xinjiang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah Cina telah melakukan banyak tindakan kekerasan terhadap etnis Uighur yang melanggar hak asasi manusia. Detik News juga menekankan pernyataan dari Abduweli Ayub, pendiri Uighur Hjelp yang merupakan organisasi non profit yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan yang berfokus untuk melakukan penelitian terkait pelanggaran hak asasi manusia etnis Uighur serta mendukung warga Uighur. Pendiri Uighur Hjelp ini menyatakan bahwa pemerintah-pemerintah yang merasa peduli, dan departemen HAM PBB harus mengintensifkan upaya dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah Cina terkait pelanggaran yang mereka lakukan di Xinjiang.

Banyak persamaan dari framing yang dilakukan oleh kedua media online, BBC News dan Detik News. Kedua media ini sama-sama menyoroti apa saja istilah-istilah etnis Uighur yang telah diubah oleh pemerintah Cina, karena kedua media ini bereferensi pada laporan milik HRW (*Human Rights Watch*) terkait pemerintah Cina yang mengubah nama-nama desa di wilayah Xinjiang. Selain itu, kedua media ini juga sama-sama menonjolkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Namun, Detik News menyampaikannya dalam poin berbeda dari keseluruhan berita. Detik News membuat poin lainnya dengan sub judul 'Tindakan keras Cina terhadap kelompok minoritas' pada poin tersebut dijelaskan kampanye-kampanye yang diluncurkan oleh pemerintah Cina, yang mana dalam kampanye-kampanye tersebut banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh etnis Uighur. Detik News juga menyoroti pernyataan pendiri Uighur Hjelp, Abduweli Ayub, pernyataan tersebut yakni memberikan solusi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina.

Kesimpulan

Melalui analisis framing Robert N. Entman, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan BBC News dan Detik News sama-sama membingkai pemberitaan terkait tindakan pemerintah Cina dalam mengubah ratusan nama Desa di wilayah Xinjiang sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menghapus identitas budaya Muslim Uighur. Kedua media mengacu pada laporan HRW (*Human Rights Watch*) serta memuat adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Namun, tetap terdapat perbedaan dalam cara kedua media menyusun, menyajikan, dan menekankan elemen-elemen pemberitaan. Hal ini mencerminkan walaupun kedua media mengangkat isu yang sama dan menggunakan sumber yang sama pula, tetapi tetap

dapat menghadirkan sudut pandang dan penekanan yang berbeda. Selain analisis kedua media terhadap pemberitaan Uighur, penelitian ini juga menunjukkan sikap pemerintah Cina terhadap etnis Uighur yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan keamanan nasional. Pemerintah Cina memandang Xinjiang sebagai wilayah yang strategis dan harus dijaga dari adanya ancaman separatisme dan ekstremisme. Oleh karena itu, pemerintah Cina melakukan pengawasan ketat, membatasi praktik keagamaan, dan mendirikan Kamp pendidikan ulang yang diklaim oleh Cina sebagai upaya deradikalisasi dan kontra terorisme. Meskipun banyaknya bukti yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah Cina selalu membantah hal tersebut dengan dalih mereka menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut untuk menjaga keamanan negaranya.

Daftar Pustaka

- A'yun, A. A. Q., Purwanto, A., & Prabhawati, A. (2024). Framing Media Pemerintah Tiongkok terhadap East Turkestan Islamic Movement. *Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-Sospol)*, 11(1), 15–30.
- Alpermann, B., & Malzer, M. (2024). “In Other News”: China’s International Media Strategy on Xinjiang — CGTN and New China TV on YouTube. *Modern China*, 50(2), 135–178. <https://doi.org/10.1177/00977004231169008>
- Azis, A., & Nurasiah, N. (2024). Development of History Problems Based on Higher Order Thinking Skills (HOTS) Using Anderson Krathwohl Taxonomy. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 111–118.
- Azis, A., & Kusnafizal, T. (2024). Information and Communication Technology in the Learning Process. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(1), 158–170.
- Baxter, J. (2023). *A History Timeline About BBC News*. History Timelines. <https://historytimelines.co/timeline/bbc-news>
- BBC. (2022). *Who are the Uyghurs and why is China being accused of genocide?* BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037>
- Company Profile. (2021). <https://detiknetwork.com/logo/logo/pdf-Company-Profile-detikcom-2021.pdf>
- Deinisa, K. D., Yanto, & Sari, S. (2023). Analisis Framing Humas PT . Angkasa Pura II Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2(3), 337–344.
- Dwita, A. S., Pramudya, G. W., & Sukmawati, A. I. (2023). Analisis Framing Murray Edelman Dalam Berita “ Dampak PT . Medco Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang” Pada Media AJNN . net. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*, 7(2), 88–101.
- F. S, L. D. D., & Setowara, S. (2023). Dampak Kebijakan Internment Camp China Terhadap Etnis Muslim Uighur dan Keamanan Xinjiang. *Global Political Studies Journal*, 7(1), 40–55. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i1>
- Firdausya, R. A., & Urfan, N. F. (2024). ANALISIS FRAMING ROBERT N ENTMAN: KEBERPIHAKAN PRESIDEN DALAM KEIKUTSERTAAN PEMILU 2024 DI KOMPAS.COM DAN CNNINDONESIA.COM. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(5), 1814–1821.
- Hanif, M., & Maula, A. (2022). Kehidupan Kaum Minoritas Muslim Hui dan Uyghur di Negeri Tirai Bambu. *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 1(02), 125–142. <https://doi.org/10.24090/jsij.v1i2.6851>
- Hidayat, R., & Prasetyo, F. H. (2023). ANALISIS FRAMING ROBERT N ENTMAN PADA BERITA LARANGAN MUDIK 2021 DI MEDIA DETIKCOM DAN KOMPAS.COM. *Communication Lens*, II, 1–17.
- Khoerunnisa, D. (2024). Analisis Framing Model Robert N . Etnman Pada Pemberitaan Kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) di Media Online. *IKRAITH-HUMANIORA*, 8(3), 153–162.
- Kurnia, I., & Baihaqi, M. A. R. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Muslim Uighur Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. 3(01), 12–23.

- <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i01>
- Lamche, A. (2024). *China changed village names “to erase Uyghur culture.”* BBC News. <https://www.bbc.com/news/articles/cxrrkl6ve390>
- Li, Y.-C. (2023). *Uighur: Bagaimana Cina Memoles Narasi Politik di Xinjiang.* DW. <https://www.dw.com/id/uighur-bagaimana-cina-memoles-narasi-politik-di-xinjiang/a-66798216>
- Nurhidayati, N., Rahayu, R., Utari, T., Nurhamzah, N., Efendi, M., & Amin, F. (2022). Analysis of the Interest of the Chinese Government in the Xinjiang Region in the Uyghur Muslim Ethnic Conflict. *Ijd-Demos*, 4(3), 1194–1202. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.336>
- Oktavia, E. M. (2023). Islam dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Kebijakan Indonesia terhadap Cina dalam Penyelesaian Konflik Etnis Uighur. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(2), 130–145.
- Putri, F. A., & Yumitro, G. (2022). Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang. *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 6(1), 15–22.
- Tahu, M. K. E. K. (2023). STRATEGI MEDIA INTERNASIONAL CHINA DALAM MENYIKAPI MEDIA PROPAGANDA BARAT MENGENAI ETNIS UIGHUR DI XINJIANG. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 214–228.
- Wang, W. (2022). On the Historical Background and Ideological Resources of the Confluence of Islam and Confucianism. *Religions*, 13(8), 15. <https://doi.org/10.3390/rel13080748>
- Welle, D. (2024). *HRW: China Ubah Ratusan Nama Desa-Desa Uighur.* Detik News. <https://news.detik.com/dw/d-7400228/hrw-china-ubah-ratusan-nama-desa-desa-uighur>
- Widyaya, I., & Setiawan, W. (2023). ANALISIS FRAMING MODEL ROBERT N. ENTMAN DALAM REPRESENTASI PUBLIK FIGUR POLITIK: EPISODE “DOSA-DOSA ANIES” DI PROGRAM “KICK ANDY” METRO TV. *SIBATIK JOURNAL*, 3(1), 103–118.
- Zahrah, F., & Windiani, R. (2023). PENGAMBILAN KEBIJAKAN RASIONAL OLEH PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS UIGHUR DI XINJIANG 2014-2019. *Journal of International Relations*, 9(1), 312–323.
- Wulandari, D. (2024). The Effectiveness of Youtube Channel as Learning Media at Conversation Class. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 67–69.